

Analisis Evaluatif Moderasi Beragama: Tantangan Tata Kelola, Dilema Wacana, dan Rekomendasi Penguatan Kebijakan

Fathan Fihri^{a*}, Suwardi^b

^{a,b}Universitas Jember

email: fathanfihri@mail.unej.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 17 Oktober 2025

Revised : 10 November 2025

Accepted : 18 November 2025

Keywords:

Religious Moderation; Policy Evaluation; Governance; Implementation Gap; Recommendations; Freedom of Religion and Belief.

Kata Kunci:

Moderasi Beragama; Evaluasi Kebijakan; Tata Kelola; Kesenjangan Implementasi; Rekomendasi; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The Religious Moderation Program is a key policy of the Indonesian government, mainstreamed through the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020–2024. This program aims to foster attitudes of balance, tolerance, and the prevention of extremism in order to reduce religion-based conflicts. However, the implementation of this program often faces substantive challenges, marked by social tensions and criticism that the policy remains largely rhetorical and top-down, lacking genuine effectiveness at the grassroots level. This study aims to objectively analyze the factors contributing to this gap and to formulate constructive recommendations for improving policy governance. The research employs a qualitative descriptive method based on literature study, reviewing reputable academic journals through the theoretical framework of policy implementation by Mazmanian and Sabatier, as well as Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA). The evaluation results reveal three main areas that hinder the program's impact: 1) Managerial Governance Challenges, where the top-down approach, dualism of programs (the Religious Moderation Village Program and the Religious Harmony-Conscious Village Program), and limited public participation constrain operational effectiveness, as analyzed through the Mazmanian-Sabatier framework. 2) Discourse Communication Dilemmas, where the policy texts are prone to interpretation (through CDA) as carrying hidden ideological agendas that potentially marginalize conservative religious views, thus triggering ideological resistance that requires careful management. 3) Lack of a Holistic Policy Priority, referring to the tendency to overemphasize "harmony" while failing to prioritize Freedom of Religion and Belief (FORB) as a central agenda. This study recommends adaptive governance reform, strengthened inter-agency coordination, and the reaffirmation of Religious Moderation as a constitutional guarantee of Freedom of Religion and Belief, to ensure a more sustainable and inclusive impact.

ABSTRAK

Program Moderasi Beragama merupakan kebijakan utama pemerintah Indonesia yang diurusutamakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Program ini bertujuan menumbuhkan sikap keseimbangan, toleransi, dan pencegahan ekstremisme guna mengurangi konflik berbasis agama. Meskipun demikian, implementasi program ini sering menghadapi tantangan substantif, ditandai oleh ketegangan sosial dan kritik bahwa kebijakan tersebut hanya sebatas retorika yang bersifat *top-down* tanpa efektivitas nyata di akar rumput. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara objektif faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut dan merumuskan rekomendasi perbaikan konstruktif bagi tata kelola kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur (penelitian kepustakaan), dengan meninjau jurnal akademis bereputasi menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, serta Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Hasil evaluasi menunjukkan tiga area utama yang menghambat dampak program: (1) Tantangan Tata Kelola Manajerial, di mana pendekatan *top-down*, dualisme program (Program Kampung Moderasi Beragama dan Desa Sadar Kerukunan), dan minimnya partisipasi publik menghambat efektivitas operasional, sebagaimana dianalisis melalui lensa Mazmanian-Sabatier. (2) Dilema Komunikasi Wacana, di mana teks kebijakan rentan diinterpretasikan (melalui Analisis Wacana Kritis) sebagai ideologi tersembunyi yang berpotensi meminggirkan pandangan keagamaan konservatif, sehingga memicu resistensi ideologis yang perlu dimanajemen. (3) Prioritas Kebijakan yang Kurang Holistik, yaitu kecenderungan fokus berlebihan pada "harmoni" tanpa menempatkan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai agenda prioritas utama. Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola yang adaptif, penguatan koordinasi antarlembaga, dan penegasan posisi Moderasi Beragama sebagai jaminan konstitusional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dan inklusif.

LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan pluralisme agama dan budaya, telah lama menghadapi kompleksitas dalam tata kelola keragaman (Susanti, 2024). Pasca-reformasi, ruang kebebasan berpendapat yang lebih terbuka, ironisnya, juga diiringi dengan meningkatnya fenomena intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial yang kerap mengatasnamakan agama (Wahyudi, 2024). Kemunculan kembali kelompok-kelompok militan ekstrem yang menyebarkan ideologi radikal dan merekrut anggota baru sejak jatuhnya rezim otoriter menjadi salah satu *asbabun nuzul* (alasan historis) bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang bersifat strategis dan fundamental (Rofiqi *et al.*, 2024).

Dalam konteks inilah Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi mengarusutamakan Moderasi Beragama sebagai kerangka strategis kebijakan nasional. Secara substantif, Moderasi

Beragama didefinisikan sebagai sikap dan pandangan yang menekankan keseimbangan (*tawazun*), adil dan berimbang dalam menjalankan keyakinan agama, sembari menghindari praktik ekstremisme yang berlebihan. Ekstremisme di sini tidak hanya merujuk pada kekerasan fisik, tetapi juga ekstremisme dalam bentuk klaim kebenaran tunggal yang menutup ruang dialog (eksklusivisme) (Susanti, 2024).

Moderasi Beragama ditetapkan sebagai fokus kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, bertujuan strategis untuk menciptakan stabilitas sosial dan menurunkan tingkat konflik berbasis agama (Rofiqi *et al.*, 2024). Berbagai inisiatif utama telah diluncurkan, seperti pembentukan Rumah Moderasi Beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan inisiasi Program Kampung Moderasi Beragama di tingkat komunitas (Rambe, Mawardi and Mayasari, 2023).

Namun, terlepas dari intensitas implementasi kebijakan dan tingginya retorika politik yang menyertai (misalnya, melalui komunikasi politik di media sosial), kritik akademis dan temuan di lapangan menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan. Kesenjangan ini terwujud dalam dua bentuk: pertama, program terasa hanya menjadi rutinitas administratif dan tidak mampu menjembatani kesenjangan pemahaman lintas agama yang memicu prasangka dan stereotip negatif di masyarakat; dan kedua, upaya moderasi justru menjadi sumber resistensi ideologis dari kelompok tertentu yang menganggapnya sebagai ancaman (Zakiah, 2025b).

Kajian ini berupaya melakukan evaluasi objektif terhadap tantangan-tantangan tersebut. Fokus utamanya adalah menganalisis akar masalah struktural, manajerial, dan ideologis yang menghambat dampak positif Moderasi Beragama di akar rumput, untuk kemudian merumuskan tawaran solusi yang konstruktif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Dimensi Konseptual Moderasi Beragama

Secara formal, strategi penguatan Moderasi Beragama yang dipayungi Kementerian Agama mencakup lima dimensi yang luas, meliputi aspek teologis hingga manajerial:

- a. Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah (*wasathiyah*).
- b. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama.
- c. Penyelarasan relasi agama dan budaya.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
- e. Pengembangan ekonomi dan Sumber daya Keagamaan (Fihri and Arifandi, 2024).

Prinsip kuncinya adalah adil dan berimbang (*tawazun*), diterapkan dalam menyikapi konsep-konsep berpasangan seperti antara akal dan wahyu, atau antara hak dan kewajiban (Susanti, 2024) (Rambe, Mawardi and Mayasari, 2023).

2. Kerangka Teori Implementasi Kebijakan (Mazmanian dan Sabatier)

Untuk menganalisis kegagalan operasional program di tingkat akar rumput, seperti Program Kampung Moderasi Beragama, kajian ini menggunakan Kerangka Teori Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Teori ini memandang bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel utama:

- a. Ketidakjelasan Tujuan Kebijakan: Terkait dengan dualisme program atau instruksi yang tumpang tindih.
- b. Lemahnya Kapasitas Pelaksana: Meliputi kemampuan dan kapabilitas aktor pelaksana di lapangan, serta dukungan anggaran.
- c. Minimnya Dukungan Lingkungan Sosial dan Politik: Merujuk pada partisipasi publik dan dukungan struktural dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Penerapan kerangka ini sangat relevan untuk mengidentifikasi bahwa hambatan implementasi Program Kampung Moderasi Beragama bersumber dari kegagalan sistemik dalam tata kelola, bukan hanya masalah teknis di lapangan (Zakiah, 2025b).

3. Kerangka Analisis Wacana Kritis (Norman Fairclough)

Aspek ketegangan, polarisasi, dan resistensi ideologis dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Model ini membedah wacana dalam tiga dimensi interkoneksi: teks, praktik wacana (interpretasi), dan praktik sosiokultural. Ideologi dan Teks: Fairclough berargumen bahwa bahasa atau teks kebijakan (wacana) tidak hanya berfungsi untuk komunikasi, tetapi juga sebagai sarana yang mampu menyampaikan ideologi yang seringkali terselip di dalamnya (*hidden ideology*). Memicu Kontra-Wacana: Kehadiran ideologi tersembunyi ini secara inheren memicu interpretasi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Analisis Wacana Kritis adalah alat yang efektif untuk memahami mengapa kebijakan pemerintah ini menimbulkan polarisasi naratif dan dianggap sebagai alat hegemoni politik oleh kelompok-kelompok tertentu.

4. Perumusan Kerangka Analisis Evaluatif

Berdasarkan tinjauan pustaka, analisis ini akan berfokus pada tiga dimensi evaluasi yang saling terkait, guna merumuskan rekomendasi perbaikan: (1) Evaluasi Tata Kelola Manajerial: Mengukur efektivitas manajerial dan struktural (koordinasi, anggaran, partisipasi) Program Moderasi Beragama melalui lensa teori implementasi, (2) Evaluasi Komunikasi Wacana: Menganalisis bagaimana kebijakan Moderasi Beragama diinterpretasikan (Analisis Wacana Kritis) oleh kelompok kontra, dan bagaimana tantangan ini dapat dimanajemen melalui komunikasi kebijakan yang lebih jelas dan inklusif (3) Evaluasi Arah Prioritas Kebijakan: Menilai apakah kebijakan telah menempatkan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai agenda inti, atau justru cenderung mengutamakan harmoni saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Pramana and Noor, 2024). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah menganalisis, mensintesis, dan melakukan kritik konstruktif terhadap temuan-temuan akademis yang sudah ada mengenai evaluasi dan kritik kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia.

1. Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi dan pengumpulan berbagai dokumen, laporan, dan artikel ilmiah yang relevan dari jurnal bereputasi nasional dan internasional yang berfokus pada evaluasi dan kritik kebijakan Moderasi Beragama. Sumber data utama yang dianalisis meliputi:

- a. Dokumen Kebijakan Resmi Kementerian Agama: Termasuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan buku panduan resmi Moderasi Beragama untuk mengidentifikasi landasan normatif dan strategi formal (Rofiqi *et al.*, 2024).
- b. Jurnal Akademis Evaluatif: Kajian yang menggunakan kerangka implementasi kebijakan (Mazmanian dan Sabatier) untuk menilai efektivitas Program Kampung Moderasi Beragama dan tantangan manajerialnya. (Zakiah, 2025a)
- c. Jurnal Akademis Wacana Kritis: Kajian yang menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Fairclough untuk menyingkap kritik dan resistensi ideologis terhadap Moderasi Beragama.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Proses analisis melibatkan tiga tahap utama:

- a. Reduksi Data: Memilah temuan kunci dan data kuantitatif dari studi lapangan yang relevan dengan tiga dimensi evaluasi (tata kelola, wacana, dan prioritas).
- b. Penyajian Data: Mengelompokkan temuan berdasarkan tema evaluasi dan menghubungkannya dengan kerangka teori (Mazmanian-Sabatier dan Fairclough).
- c. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan kesimpulan evaluatif dan memberikan rekomendasi perbaikan konstruktif yang didukung oleh temuan empiris.

Validasi temuan dilakukan melalui triangulasi sumber, membandingkan klaim resmi kebijakan (retorika) dengan temuan empiris di lapangan (realisasi) dan interpretasi kritis (resistensi) (Oskar Gultom, 2022).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Evaluasi terhadap efektivitas implementasi Program Moderasi Beragama di tingkat akar rumput, yang dicontohkan melalui Program Kampung Moderasi Beragama, menunjukkan adanya hambatan yang bersifat manajerial dan struktural, yang sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier (Zakiah,

2025b) (Wahyudi, 2024).

Salah satu tantangan signifikan adalah bahwa implementasi kebijakan cenderung bersifat *top-down* (dari atas ke bawah). Penelitian menunjukkan bahwa program Moderasi Beragama seringkali dianggap asing atau dipaksakan oleh masyarakat di tingkat komunitas karena mereka tidak diberikan ruang yang memadai untuk berkontribusi dan berdialog sejak awal perumusan kebijakan. Program yang minim partisipasi publik cenderung kehilangan relevansinya dan sulit mendapatkan dukungan lingkungan sosial, yang merupakan variabel penting dalam kerangka Mazmanian dan Sabatier (Zakiah, 2025a).

Hambatan struktural yang paling jelas terlihat adalah masalah dualisme program di Kementerian Agama. Terjadi tumpang tindih antara Program Kampung Moderasi Beragama (di bawah Ditjen Bimas Islam) dan Desa Sadar Kerukunan (di bawah PKUB). Dualisme ini mengakibatkan kebingungan peran, instruksi yang tidak sinkron, dan kompleksitas pelaporan di tingkat pelaksana teknis daerah, yang mencerminkan ketidakjelasan distribusi kewenangan yang diidentifikasi oleh Mazmanian dan Sabatier.

Data operasional dari studi evaluasi di lapangan, khususnya di Maluku Utara, mengkonfirmasi adanya kesenjangan serius antara target normatif dan realitas operasional: (Zakiah, 2025b)

Indikator Implementasi Program Kampung Moderasi Beragama	Realitas Operasional (Persentase)	Implikasi Terhadap Tata Kelola
Pertemuan rutin pengurus Program Kampung Moderasi Beragama	Hanya 8,33%	Lemahnya kapasitas pelaksana dan sekadar rutinitas administratif.
Bantuan langsung dari Pemerintah Daerah	Hanya 16,67% menerima	Menunjukkan minimnya dukungan lingkungan sosial/politik di tingkat local.
Evaluasi Kegiatan Program Kampung Moderasi Beragama	Hanya dilakukan di 50% wilayah	Menggambarkan lemahnya sistem monitoring dan akuntabilitas.
Kunjungan Pejabat	Hanya di 58,33% lokasi	Indikasi kurangnya dukungan struktural dan visibilitas program di lapangan.

Data tersebut memperkuat temuan bahwa implementasi yang efektif sangat bergantung pada konteks lokal, kapasitas aktor, dan ketersediaan dukungan struktural, yang saat ini masih timpang. Program Moderasi Beragama pun terperangkap dalam rutinitas administratif tanpa mampu berinovasi secara responsif terhadap kebutuhan riil komunitas (Zakiah, 2025a).

Meskipun tujuan resmi Moderasi Beragama adalah untuk memperkuat harmoni, wacana kebijakan ini justru memicu ketegangan dan resistensi politik ideologis dari kelompok-kelompok kontra.

Interpretasi Ideologi Terselip Melalui Analisis Wacana Kritis

Penerapan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough terhadap strategi penguatan Moderasi Beragama mengemukakan bahwa wacana atau teks kebijakan, meskipun bersifat formal, dapat menjadi sarana penyampaian ideologi yang tersembunyi (*hidden ideology*).

Kelompok-kelompok yang kontra terhadap kebijakan ini menginterpretasikan proyek Moderasi Beragama sebagai upaya hegemoni ideologi negara untuk menancapkan paham "Islam moderat" yang dianggap sejalan dengan sistem sekuler, demokrasi, dan pluralisme ala Barat. Interpretasi ini memicu ketegangan yang mendalam, karena menyentuh ranah akidah dan otoritas keagamaan.

Bagi kelompok penentang, Moderasi Beragama dikhawatirkan akan: *Melegalisasi Pluralisme*: Dianggap mendorong toleransi yang melampaui batas syariat Islam dengan menyerukan penerimaan pluralisme teologis (semua agama benar), yang dinilai meracuni akidah umat. *Membungkam Aktivitas Keagamaan*: Kebijakan ini dipandang sebagai alat untuk membungkam aktivitas *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran) dan menghalangi perjuangan penerapan Islam *kaffah* (Islam secara totalitas). Dalam pandangan mereka, Moderasi Beragama bukan solusi, melainkan instrumen untuk mengukuhkan hegemoni sekuler (Sahgal, 2024).

Manajemen terhadap resistensi ideologis ini merupakan tantangan komunikasi kebijakan yang sangat besar. Untuk meredam interpretasi kontra, pemerintah perlu menegaskan bahwa Moderasi Beragama tidak berarti lemah atau kompromistis terhadap prinsip-prinsip keagamaan yang mendasar (Manullang, 2025). Sebaliknya, moderasi harus diposisikan sebagai kekuatan untuk bersikap bijaksana saat menghadapi masalah dan perbedaan, berlandaskan ajaran agama yang *rahmatan lil-alamin* (Amrizon *et al.*, 2025).

Kritik struktural terhadap Moderasi Beragama adalah terkait fokusnya. Secara historis, tata kelola keagamaan di Indonesia cenderung diarahkan pada upaya menciptakan harmoni atau kerukunan. Moderasi Beragama, sebagai kebijakan penerusnya, dikritik karena terlalu fokus pada harmoni sosiologis tetapi belum menjadikan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai agenda prioritas utama (Oskar Gultom, 2022).

Pendekatan yang menekankan harmoni tanpa menjamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan secara penuh memiliki dua risiko: pertama, berpotensi menutupi masalah diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas berkeyakinan; dan kedua, menciptakan *harmoni yang represif* di mana hak-hak berkeyakinan dibatasi demi terciptanya ketenangan sosial semata. Oleh karena itu, penajaman arah kebijakan harus mengintegrasikan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai pilar fundamental dari Moderasi Beragama. Hal ini memastikan bahwa kebijakan tersebut bertindak sebagai jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya tanpa ekstremisme dan tanpa diskriminasi, bukan sekadar alat untuk menjaga ketenangan sosial

permukaan.

Meskipun menghadapi tantangan implementasi, Moderasi Beragama telah menunjukkan dampak positif di beberapa sektor, yang memberikan landasan untuk rekomendasi perbaikan konstruktif. Di sektor pendidikan, program-program di sekolah dan madrasah telah meningkatkan pemahaman kontekstual tentang ajaran agama dan pentingnya dialog antaragama, yang berkontribusi pada terciptanya suasana belajar yang harmonis (Fihrisi *et al.*, 2023). Kampanye digital melalui media sosial (menggunakan tagar seperti *#ModerasiBeragama* dan *#TolakRadikalisme*) juga berhasil mendorong partisipasi aktif pengguna dan menyebarkan pesan toleransi dengan cepat dan luas.

Berdasarkan analisis evaluatif terhadap tantangan manajerial dan wacana, berikut adalah rekomendasi perbaikan konstruktif yang dapat ditawarkan kepada pemangku kepentingan:

Area Evaluasi	Tantangan Utama	Rekomendasi Perbaikan Konstruktif
Tata Kelola dan Implementasi	Desain <i>top-down</i> , dualisme program (Program Kampung Moderasi Beragama dan Desa Sadar Kerukunan), dan rendahnya partisipasi publik.	Reformasi Struktural dan Adaptif: (1) Mengubah pendekatan menjadi kolaboratif dan adaptif terhadap kearifan lokal. (2) Mengatasi Dualisme Program dengan mengintegrasikan Program Kampung Moderasi Beragama dan Desa Sadar Kerukunan ke dalam satu entitas yang terkoordinasi di bawah payung yang jelas untuk memastikan efisiensi dan kejelasan peran. (3) Meningkatkan dukungan anggaran, monitoring, dan forum perjumpaan aktor kunci untuk memvalidasi substansi, bukan hanya administrasi program.
Wacana dan Resistensi	Narasi rentan diinterpretasikan sebagai ideologi tersembunyi yang hegemoni dan meminggirkan kelompok tertentu.	Komunikasi dan Klarifikasi Kebijakan: (1) Menegaskan bahwa Moderasi Beragama adalah kerangka nilai kebangsaan dan konstitusional, bukan pemaksaan tafsir teologi tunggal. (2) Memosisikan Moderasi Beragama sebagai kekuatan untuk bersikap bijaksana (adil dan berimbang) dalam menentang pandangan yang sempit dan ekstremis, bukan sebagai sikap kompromistis.
Arah Prioritas	Kecenderungan fokus berlebihan pada "harmoni" tanpa menempatkan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai agenda inti.	Penajaman Fokus Kebijakan: Secara eksplisit menempatkan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai prioritas utama dari Moderasi Beragama. Hal ini memastikan bahwa kebijakan ini mengatasi masalah diskriminasi struktural, bukan sekadar menjaga harmoni

Area Evaluasi	Tantangan Utama	Rekomendasi Perbaikan Konstruktif
		permukaan.

PENUTUP / KESIMPULAN

Moderasi Beragama adalah kebijakan fundamental yang vital bagi keberlanjutan pluralisme Indonesia. Namun, upaya pengarusutamaannya terhambat oleh tantangan tata kelola yang kaku (dualisme program dan pendekatan *top-down* yang memicu inefektivitas operasional) dan dilema wacana (interpretasi kebijakan sebagai ideologi hegemoni yang membungkam kritik keagamaan).

Agar program ini dapat bertransisi dari retorika menjadi gerakan sosial-keagamaan yang inklusif dan berkelanjutan, reformasi mendasar diperlukan. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan implementasi yang adaptif, mengatasi dualisme kelembagaan, dan yang terpenting, menegaskan posisi Moderasi Beragama sebagai jaminan konstitusional atas hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, alih-alih sekadar penekanan pada kerukunan sosiologis. Melalui perbaikan ini, Moderasi Beragama dapat mewujudkan dampak positif secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizon *et al.* (2025) 'ISLAM MODERAT VERSUS TRADISIONAL: TINJAUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN', *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), pp. 835–847. Available at: <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v4i3.684>.
- Fihri, F. *et al.* (2023) 'Menangani Ekstramisme Dan Membina Moderasi Beragama Di Sekolah: Praktik Terbaik Dan Pembelajaran', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15), pp. 142–154.
- Fihri, F. and Arifandi, A. (2024) 'PENGUATAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA MELALUI KULIAH UMUM MODERASI BERAGAMA DI MASJID AL-HIKMAH UNIVERSITAS JEMBER', *BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), pp. 238–243. Available at: <https://doi.org/10.62335/3prs6v92>.
- Manullang, H.B. (2025) 'Analisis Kritis terhadap Moderasi Beragama dalam Upaya Pengembangan Perdamaian dalam Konteks Kemajemukan Agama', *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies*, 5(1), pp. 19–36. Available at: <https://doi.org/10.21460/aradha.2025.51.1362>.
- Oskar Gultom (2022) *Moderasi Beragama, Perspektif*. Available at: <https://doi.org/10.69621/jpf.v17i1.149>.
- Pramana, M.S.A. and Noor, M.F. (2024) 'KAJIAN KOMPARATIF AL-QUR'AN DAN WEDA TENTANG MODERASI BERAGAMA', *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 4(1), p. 75. Available at: <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9066>.
- Rambe, T., Mawardi, M. and Mayasari, S. (2023) 'Rumah Moderasi Beragama di PTKIN: Potret Kebijakan

- dan Strategi Mewujudkan Beragama Moderat di Perguruan Tinggi', *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), p. 214. Available at: <https://doi.org/10.22373/arj.v3i2.19826>.
- Rofiqi, R. *et al.* (2024) 'Moderasi Beragama : Analisis Kebijakan dan Strategi Penguatan di Kementerian Agama Republik Indonesia', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), pp. 16–36. Available at: <https://doi.org/10.36420/ju.v9i1.6544>.
- Sahgal, A. (2024) 'Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность»', *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), pp. 9–15.
- Susanti, Y. (2024) 'Moderasi Beragama Dalam Perspektif Habitus Pierre Bourdieu Dan Tafsir Kebudayaan Clifford Geertz', *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, 8(2), pp. 95–104.
- Wahyudi, R. (2024) 'Narasi Moderasi Beragama Ulama Dayah Aceh: Studi Terhadap Argumen dan Respons Dalam Menangkal Radikalisme', *Jurnal an-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 11(2), pp. 251–269.
- Zakiah (2025a) 'Penguatan Tata Kelola Kebijakan Moderasi Beragama : Menjawab Tantangan Implementasi Struktural, Partisipatif dan Solutif', *Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), pp. 519–540.
- Zakiah (2025b) 'Reinforcing the Governance of Religious Moderation Policy: Addressing Structural, Participatory, and Strategic Implementation Challenges', *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(1), pp. 519–540. Available at: <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.239>.